

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa di Kampung Wasur Distrik Merauke melalui Pendidikan dan Pelatihan

Capacity Building of Village Apparatus in Village Fund Management in Wasur Village Merauke District through Education and Training

Umiyati Haris^{1*}, Fransin Kontu², Syahrudin Syahrudin³, Hubertus Oja⁴,
Kartika Sari⁵, Desi Rachmawati⁶

^{1,2,4} Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Universitas Musamus Merauke, Indonesia

³ Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik,
Universitas Musamus Merauke, Indonesia

⁵⁻⁶ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Universitas Musamus Merauke, Indonesia

Korespondensi penulis: umiyatih12@unmus.ac.id*

Article History:

Received: Juli 18, 2024

Revised: Agustus 20, 2024

Accepted: September 21, 2024

Published: September 25, 2024

Keywords: Capacity; Village Fund Management; Education and Training; Merauke

Abstract: Improving Capacity building of village officials in the management of the Village Fund is a crucial step to ensure the effective, efficient, and appropriate use of funds. This research was conducted in Wasur Village, Merauke District, through an education and training programme designed to improve knowledge, skills and attitudes of village officials in managing the Village Fund. Methods methods used included a participatory approach by involving the apparatus actively in every stage, from needs identification to post-training evaluation. The results showed in the capacity of the village apparatus, which can be seen from their ability to their ability to develop better budget planning, improve the quality of financial financial reporting, and applying the principles of transparency and accountability in their management of the Village Fund. In addition, there were more positive attitudinal changes towards the importance of good governance in village governance. The discussion emphasised that continuous education and training as well as intensive technical assistance are key factors in maintaining the continuity of sustainability of the capacity building of the apparatus. In conclusion, the programme did not short-term impact but also instils a strong foundation for sustainable development in Wasur Village. It is recommended that similar programmes be held periodically involving various parties to ensure that village officials continue to adapt to the challenges and maintain the quality of Village Fund management for the welfare of the community.

Abstrak

Peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan Dana Desa merupakan langkah krusial untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, dan sesuai dengan regulasi. Penelitian ini dilakukan di Kampung Wasur, Distrik Merauke, melalui program pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur dalam mengelola Dana Desa. Metode pengabdian yang digunakan mencakup pendekatan partisipatif dengan melibatkan aparatur secara aktif dalam setiap tahap, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi pasca-pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam kapasitas aparatur kampung, yang terlihat dari kemampuan mereka menyusun perencanaan anggaran yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, terdapat perubahan sikap yang lebih positif terhadap pentingnya good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. Pembahasan menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pendampingan teknis yang intensif merupakan faktor kunci dalam menjaga

kesinambungan peningkatan kapasitas aparatur. Kesimpulannya, program ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek tetapi juga menanamkan fondasi yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan di Kampung Wasur. Disarankan agar program serupa diadakan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa aparatur kampung terus dapat beradaptasi dengan tantangan yang ada dan menjaga kualitas pengelolaan Dana Desa demi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kapasitas; Pengelolaan Dana Desa; Pendidikan dan Pelatihan; Merauke

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa telah memberikan kesempatan bagi desa-desa di seluruh Indonesia untuk mempercepat pembangunan di berbagai bidang (Lindawaty, 2023). Namun, pengelolaan yang optimal dari dana ini menuntut adanya kemampuan dan kapasitas yang memadai dari aparatur kampung sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Desa.

Kampung Wasur di Distrik Merauke, seperti banyak kampung lainnya di Papua, menghadapi tantangan dalam mengelola Dana Desa secara efektif dan transparan. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menjadi salah satu kendala utama. Aparatur kampung, yang seringkali masih minim pengetahuan dan keterampilan manajerial, perlu dibekali dengan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi, prosedur, serta strategi pengelolaan Dana Desa agar dana tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Suherry, 2024).

Masalah ini menjadi semakin penting mengingat besarnya tanggung jawab yang harus diemban oleh aparatur kampung dalam mengelola Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penggunaan dana yang kurang tepat, tidak efisien, atau bahkan penyalahgunaan dana dapat berdampak negatif, tidak hanya pada pembangunan fisik kampung, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Setyaningsih & Sundari, 2023). Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparatur kampung menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Pendidikan dan pelatihan adalah salah satu metode yang paling efektif untuk memperkuat kemampuan aparatur kampung dalam pengelolaan Dana Desa (Zulian, 2024). Melalui program diklat yang terstruktur dan komprehensif, para aparatur kampung dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola Dana Desa dengan baik (Zein & Septiani, 2024). Selain itu, diklat juga dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran dan komitmen terhadap prinsip-prinsip *good governance*, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Aromatic, 2024).

Urgensi dari kegiatan pengabdian ini tidak bisa diabaikan, mengingat banyaknya kasus di mana pengelolaan Dana Desa tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tanpa peningkatan kapasitas, aparatur kampung akan terus menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kondisi ini juga dapat menghambat upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di tingkat desa, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Lebih jauh, kegiatan ini juga penting dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih. Dengan meningkatkan kapasitas aparatur kampung, diharapkan mampu mengurangi potensi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Kampung Wasur.

Tujuan utama dari kegiatan pendidikan dan pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi aparatur Kampung Wasur dalam mengelola Dana Desa secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, diharapkan aparatur kampung dapat lebih mandiri dalam mengelola Dana Desa, mampu melakukan perencanaan yang baik, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk pembangunan yang berkelanjutan di kampung mereka.

2. METODE

Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan ini berfokus pada pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan aparatur Kampung Wasur secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan. Langkah awal dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh aparatur kampung dalam pengelolaan Dana Desa. Proses identifikasi ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dengan para pemangku kepentingan setempat, termasuk kepala kampung, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kapasitas yang ada dan area yang memerlukan peningkatan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, dikembangkan kurikulum dan materi pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan aparatur kampung. Materi ini mencakup aspek-aspek teknis pengelolaan Dana Desa, seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, serta pelaporan keuangan, hingga penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Proses pembelajaran dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan simulasi untuk memberikan pemahaman yang mendalam

dan aplikatif kepada para peserta. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa para aparatur kampung tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam tugas sehari-hari mereka.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan secara intensif dalam bentuk sosialisasi di hari pertama dan pelatihan di hari kedua. Sosialisasi dan pelatihan ini dirancang untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk berlatih dan memperdalam pemahaman mereka melalui studi kasus yang relevan dengan kondisi di Kampung Wasur. Selain itu, sesi mentoring bertujuan untuk memberikan dukungan teknis dan bimbingan secara langsung kepada aparatur kampung dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu aparatur kampung mengatasi hambatan yang mungkin muncul saat mereka menerapkan ilmu yang baru dipelajari dalam pengelolaan Dana Desa.

3. HASIL

Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan bagi aparatur Kampung Wasur menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kapasitas mereka dalam mengelola Dana Desa. Berdasarkan evaluasi awal, terdapat perbedaan yang nyata antara kemampuan aparatur sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Pada awalnya, banyak aparatur yang belum memahami sepenuhnya prosedur pengelolaan Dana Desa, khususnya terkait dengan perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Namun, setelah mengikuti pelatihan, terjadi peningkatan pengetahuan yang cukup berarti, yang tercermin dalam kemampuan mereka menyusun perencanaan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi

Selama pelatihan, para aparatur juga diperkenalkan dengan berbagai studi kasus yang relevan dengan konteks lokal. Hasil dari studi kasus ini menunjukkan bahwa aparatur kampung menjadi lebih kritis dalam menilai permasalahan yang ada dan lebih mampu menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip good governance. Mereka mampu mengidentifikasi kesalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan Dana Desa dan memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah kesalahan tersebut di masa depan. Hal ini tercermin dalam kualitas diskusi dan simulasi yang dilakukan selama pelatihan.



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan

Selain peningkatan dalam hal pengetahuan dan keterampilan teknis, terdapat perubahan yang signifikan dalam sikap aparatur kampung terhadap pengelolaan Dana Desa. Mereka menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan dana. Ini terlihat dari peningkatan partisipasi mereka dalam sesi mentoring dan pendampingan, di mana mereka secara aktif berkolaborasi dengan mentor untuk memperbaiki prosedur internal dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.



Gambar 3. Diskusi Interaktif

Dalam implementasi di lapangan, hasil pelatihan ini mulai tampak dalam bentuk perubahan nyata dalam pengelolaan Dana Desa di Kampung Wasur. Aparatur kampung mampu menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik dan transparan, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka berhasil mengidentifikasi dan mengatasi potensi penyalahgunaan dana yang sebelumnya tidak terdeteksi. Ini menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membekali aparatur dengan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam tugas sehari-hari.

4. DISKUSI

Hasil dari kegiatan pendidikan dan pelatihan ini menegaskan pentingnya upaya peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan yang baik tidak hanya bergantung pada regulasi yang ketat, tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam memahami dan menerapkan regulasi tersebut dengan benar. Kegiatan ini membuktikan bahwa dengan memberikan pelatihan yang tepat dan relevan, aparatur kampung dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Ini menjadi bukti bahwa peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan adalah strategi yang efektif untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Peningkatan kapasitas ini juga memberikan dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa. Melalui pelatihan ini, aparatur kampung tidak hanya diajarkan keterampilan teknis, tetapi juga pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana. Ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Sinaga, 2024). Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat, pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa menjadi lebih ketat, sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir (Selvia & Arza, 2023). Selain itu, masyarakat menjadi lebih percaya dan mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Perubahan sikap aparatur kampung yang lebih komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik juga merupakan hasil yang patut dicatat. Sebelum pelatihan, masih terdapat sikap pasif dan kurangnya inisiatif dalam mengelola Dana Desa. Namun, setelah pelatihan, aparatur menunjukkan peningkatan kesadaran akan tanggung jawab mereka dan pentingnya menjalankan tugas dengan integritas tinggi. Hal ini penting karena sikap dan komitmen dari aparatur kampung merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan dalam pengelolaan Dana Desa. Jika aparatur memiliki sikap yang tepat, maka regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan lebih efektif (Firdaus, 2024).

Selain itu, pelatihan ini juga menyoroti pentingnya pendampingan yang berkelanjutan. Meskipun pelatihan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, pendampingan secara terus-menerus membantu aparatur kampung dalam mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam penerapan di lapangan. Pendampingan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral, di mana aparatur diberikan dorongan untuk terus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga kesinambungan perubahan positif yang dihasilkan dari pelatihan.

Dalam konteks yang lebih luas, hasil dan pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan. Peningkatan kapasitas aparatur kampung merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada pengelolaan Dana Desa, tetapi juga pada kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan aparatur yang lebih kompeten, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan efektif, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, program-program serupa perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk mendukung terciptanya desa-desa yang mandiri dan sejahtera.

5. KESIMPULAN

Berisi deskripsi tentang kesimpulan hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk refleksi teoritis dan rekomendasi. (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1,5) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur Kampung Wasur dalam pengelolaan Dana Desa telah berhasil meningkatkan kapasitas mereka secara signifikan. Melalui pendekatan yang partisipatif dan berfokus pada kebutuhan lokal, aparatur kampung kini memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik dalam mengelola Dana Desa secara efektif dan transparan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur kampung tidak hanya berkontribusi pada tata kelola Dana Desa yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menanamkan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kampung Wasur.

Sebagai saran, program pendidikan dan pelatihan serupa sebaiknya diadakan secara berkala dan berkelanjutan untuk menjaga dan terus meningkatkan kapasitas aparatur kampung. Selain itu, penting untuk melibatkan lebih banyak pihak, termasuk akademisi, LSM, dan lembaga pemerintah lainnya, untuk berkolaborasi dalam mengembangkan materi pelatihan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan lokal. Dengan upaya yang konsisten, diharapkan aparatur kampung dapat terus beradaptasi dengan

tantangan yang ada dan tetap menjaga kualitas pengelolaan Dana Desa demi kesejahteraan masyarakat.

6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih penulis ucapkan kepada masyarakat kampung Wasur Distrik Merauke yang telah bersedia menerima tim kami dari Universitas Musamus Merauke untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kampung Wasur merupakan salah satu mitra Universitas Musamus Merauke. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi selama kegiatan.

DAFTAR REFERENSI

- Aromatica, D. (2024). *Membangun desa dengan revolusi digital*. Mega Press Nusantara.
- Firdaus, I. (2024). Efektivitas UU Cipta Kerja dalam melindungi hak pekerja penyandang disabilitas. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(1). <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jfh/article/view/115>
- Lindawaty, D. (2023). Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa [Village development post Law No. 6 of 2014 on villages]. *Jurnal Politica*, 14(1). <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/4120>
- Selvia, D., & Arza, F. (2023). Pengaruh transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap potensi kecurangan dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3). <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/707>
- Setyaningsih, Y., & Sundari, S. (2023). Pengaruh dana desa terhadap pendapatan masyarakat di Desa Pandankrajan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(1). <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/7150>
- Sinaga, A. (2024). Implementasi prinsip good governance dalam program kerja Bappeda Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13). <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7468>
- Suherry, S. (2024). *Manajemen pembangunan desa yang efektif*. Azka Pustaka.
- Zein, H., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi pemerintahan daerah*. Sada Kurnia Pustaka.
- Zulian, M. (2024). Kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga. *Wissen*, 2(1). <https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/view/41>